

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Lembaga Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis Kelurahan Jatihandap

Gambar 4.1

Peta Lokasi Kelurahan Jatihandap



Sumber : Data Kelurahan Jatihandap

Kelurahan Jatihandap merupakan kelurahan yang berada di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. Batas wilayah utara kelurahan ini adalah Desa/Kelurahan Mandalamekar, batas selatan kelurahan ini adalah Desa/Kelurahan Cicaheum, batas timur kelurahan ini adalah Desa/Kelurahan Karang Pamulang, batas barat kelurahan ini adalah Desa/Kelurahan Pasirlayung. Luas wilayah Kelurahan Jatihandap adalah 205,00Ha. Adapun jumlah penduduk di Kelurahan Jatihandap adalah sebanyak 22.029 orang dengan kepadatan penduduk 10.745,85 per KM.

Regiza Rossa Lediana, 2018

PERENCANAAN PROGRAM LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN JATIHANDAP KECAMATAN MANDALAJATI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4.1.2 Sejarah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)

Orde Reformasi merupakan tonggak sejarah terbentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai wadah berhimpunnya LPM yang ada di Desa dan Kelurahan didalam menyalurkan aspirasinya dalam upaya memberdayakan masyarakat di pedesaan / kelurahan menuju masyarakat yang sejahtera. Adapun mendasari terbentuknya LPM dan Asosiasi LPM adalah :

1. Banyaknya tekanan dan kritikan dari berbagai pihak (termasuk LSM–LSM) terhadap keberadaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan agar dibubarkan , hal ini disebabkan :

a. LKMD merupakan produk Pemerintah Orde Baru.
 b. Struktur kelembagaan LKMD kepengurusannya lebih dominan dikuasai oleh unsur birokrat, dimana peranan Kepala Desa/Lurah selaku Ketua LKMD istri Kepala Desa/Lurah dan karyawan Desa/Kelurahan duduk di seksi- seksi.

2. Masih adanya pemikiran dari para pengurus LKMD bahwa dengan memperhatikan kondisi LKMD selama ini apa yang diharapkan ternyata masih memerlukan upaya penguatan lembaga dimaksud melalui pelbagai penyesuaian sejalan dan senafas dengan semangat demokrasi, reformasi dan transparansi sehingga tidak dibubarkan tetapi dirubah nomenklaturnya.

3. Didorong oleh kesadaran bahwa upaya memperkuat kualitas kelembagaan LKMD akan sangat tergantung kepada LKMD itu sendiri yang secara makro telah diberi peluang luas oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dimusyawarahkan oleh pengurus LKMD mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Peovinsi dan klimaknya adalah Forum Temu LKMD dalam Tingkat Nasional.

Dengan adanya dasar punt.1,2 dan 3 tersebut diatas , maka dilaksanakan Forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional pada tanggal 18 s/d 21 Juli 2000 bertempat di Hotel Permata Jl.Lemahneundeut Kota Bandung.

4.1.3 Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Jatihandap

Adapun fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Sebagai mitra pemerintah pusat dan daerah dalam mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat kegiatan pe, bangunan

lingkungan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum masyarakat.

2. Sebagai mitra institusi/kelompok peduli pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan lingkungan.

3. Sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan lingkungan.

4. Sebagai media komunikasi dan informasi pembangunan antara pemerintah dengan masyarakat.

4.1.4 Visi dan Misi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Jatihandap

Visi yang dimiliki oleh LPM Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung adalah “Mitra kerja Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang berdaya dan mandiri.”

Adapun misi dari LPM Kelurahan jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan kelembagaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ;
 2. Pengembangan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat ;
 3. Peningkatan pemanfaatan Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna ;
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam merumuskan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat

4.1.5 Tujuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Jatihandap

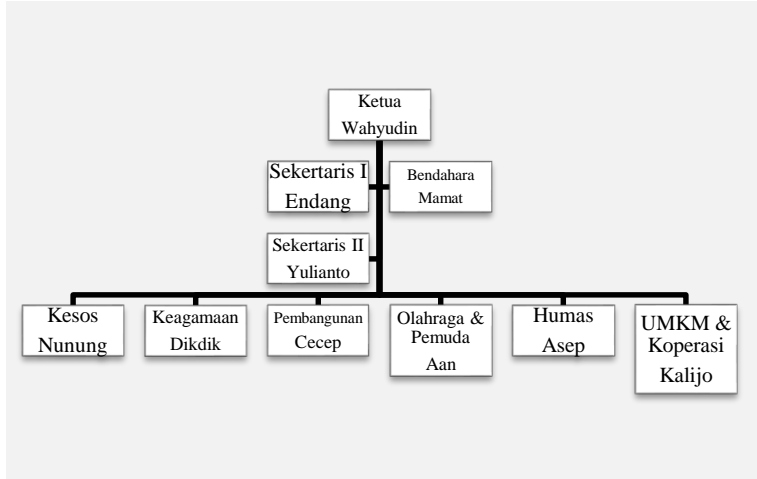
Adapun tujuan dari LPM kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat (*to give ability or enable*).
2. Memberdayakan seluruh potensi masyarakat.
3. Memberikan wewenang secara proporsional kepada masyarakat untuk pengambilan keputusan (*to give authority*) .

4.1.6 Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Jatihandap

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)



Kelurahan Jatihandap

Sumber : Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Kelurahan Jatihandap

4.1.7 Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Jatihandap

Adapun tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pembangunan bersama Pemerintah Daerah
2. Menjembatani Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan pemerintah serta lembaga peduli pemberdayaan masyarakat dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
3. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam pembangunan

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Identitas Responden

Data yang diambil ini merupakan data yang tergolong warga miskin RW 06 Kelurahan Jatihandap dengan total sampling 69 orang. Berikut adalah data identitas responden yang disajikan dalam bentuk tabel. Adapun pengklasifikasian identitas responden penelitian ini dibatasi berdasarkan tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin dan status perkawinan.

Tabel 4.1
Penggolongan Warga Miskin berdasarkan pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	<i>f</i>	%
1.	SD	32	46.38
2.	SMP	22	31.89
3.	SMA	15	21.73
	Jumlah	69	100

Sumber : data diolah 2018

Tabel diatas mendeskripsikan bahwa sebanyak 46.48% atau kurang dari setengahnya berpendidikan terakhir SD. Sedangkan 31.89% atau kurang dari setengahnya merupakan responden yang berpendidikan terakhir SMP. Adapun responden yang berpendidikan maksimum SMA adalah sebesar 21.73%

Tabel 4.2
Penggolongan Warga Miskin berdasarkan Usia

No.	Tingkat Usia	<i>f</i>	%
1.	20-30 Tahun	2	2.89
2.	31-40 Tahun	6	8.69
3.	41-50 Tahun	10	14.49
4.	51-60 Tahun	11	15.95
5.	>60 Tahun	40	57.98
	Jumlah	69	100

Sumber : data diolah 2018

Tabel diatas menunjukan persentase berdasarkan usia. Responden yang berusia lebih dari 60 tahun merupakan responden yang mendominasi yaitu sebanyak 57.98% atau lebih dari setengahnya. Responden yang berusia 51-60 tahun berjumlah 15.95%, responden berusia 41-50 tahun sebanyak 14.49%, adapun

responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 8.69% dan usia responden berkisar 20-30 tahun ada 2.89%.

Tabel 4.3
Penggolongan Warga Miskin berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	<i>f</i>	%
1.	Laki-laki	34	49.27
2.	Perempuan	35	50.73
	Jumlah	69	100

Sumber : data diolah 2018

Tabel tersebut menjelaskan responden yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 49.27% sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 50.73%.

Tabel 4.4
Penggolongan Warga Miskin berdasarkan Status Perkawinan

No.	Status	<i>f</i>	%
1.	Belum Kawin	0	0
2.	Kawin	35	50.73
3.	Cerai Hidup	4	5.79
5.	Cerai Mati	30	43.48
	Jumlah	69	100

Sumber : data diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas jumlah responden dengan status kawin merupakan tertinggi dibanding yang lain yaitu sejumlah 50.73%, kemudian untuk status cerai mati sejumlah 43.48%, adapun status cerai hidup sebanyak 5.79% dan selanjutnya status belum kawin sebanyak 0%.

4.2.2 Gambaran Kemiskinan Berdasarkan Pengalaman Pendidikan Formal Masyarakat di Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.

Pada penelitian ini gambaran mengenai kemiskinan masyarakat di kelurahan Jatihandap di fokuskan menjadi empat kategori yaitu kategori kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Untuk lebih jelasnya, pemaparan tentang gambaran kemiskinan di kelurahan Jatihandap dituangkan kedalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5
Gambaran Kemiskinan di Rw 06 Kelurahan Jatihandap

No.	Kondisi Kemiskinan	Tingkat Pendidikan Warmis						Σf	$\Sigma\%$
		SD		SMP		SMA			
		<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%		
	Kemiskinan Absolut	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	Σf	$\Sigma\%$
1.	Responden mengalami masalah kesehatan	22	31,89	11	15,95	2	2,89	35	50,73
2.	Responden tidak melakukan usaha peningkatan pendidikan	32	46,37	11	15,49	13	18,85	56	81,15
3.	Responden tidak bekerja	30	43,47	12	17,39	0	0,0	0	60,87
4.	Responden bekerja	2	2,89	10	14,49	15	21,73	27	39,13
5.	Pekerjaan Responden								
	a. Petani	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	b. Pedagang	0	0,0	7	10,14	0	0,0	7	10,14
	c. Buruh Harian Lepas	2	2,89	3	7,69	10	14,49	15	21,74
	d. Peternak	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	e. Lainnya...	0	0	0	0,0	5	7,24	5	7,25
6.	Penghasilan responden dalam sebulan								
	a. Dibawah 300.000	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	b. 300.000-520.000	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	c. 530.000-730.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	d. 740.000-940.000	0	0,0	2	2,89	0	0,00	2	2,89
	e. 1.200.000	32	46,37	20	28,98	15	21,73	67	97,02
7.	Status kepemilikan rumah								
	a. Milik Sendiri	30	43,47	22	31,88	15	21,73	67	97,02
	b. Kontrak	1	1,44	0	0,0	0	0,0	1	1,4
	c. Bebas Sewa	1	1,44	0	0,0	0	0,0	1	1,44
	d. Dinas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	e. Lainnya	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Kemiskinan Relatif	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	Σf	$\Sigma\%$
1.	Responden bersifat tertutup dalam melakukan interaksi sosial	3	4,34	0	0,0	6	8,69	9	13,05

No.	Kondisi Kemiskinan	Tingkat Pendidikan Warmis						Σf	$\Sigma\%$
		SD		SMP		SMA			
	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%			
2.	Kedaaan rumah tangga responden lebih buruk dibanding yang lain	25	36.23	10	14.49	5	7.24	40	57.96
	Kemiskinan Absolut	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	Σf	$\Sigma\%$
1.	Responden yang tidak memiliki keahlian atau potensi diri	30	43.47	22	31.88	13	18.84	65	94.21
2.	Responden yang tidak memiliki potensi tetapi ingin memiliki potensi diri	8	11.59	17	6.07	7	10.14	32	46.37
3.	Responden yang tidak memiliki kebiasaan menabung	31	44.92	20	28.98	15	21.73	66	95.66
	Kemiskinan Struktural	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	Σf	$\Sigma\%$
1.	Responden yang memiliki kondisi lingkungan alam buruk	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2.	Responden yang tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam sekitar	4	5.79	6	8.69	1	1.44	11	15.95

Sumber : data diolah 2018

Dari tabel 4.5 diatas menggambarkan gambaran kemiskinan yang ada di RW 06 kelurahan Jatihandap, berikut adalah penjelasan dari ke empat indikator kemiskinan yang menjadi focus pada penelitian ini :

4.2.2.1 Kemiskinan Absolut

Sebanyak 50.73% responden memiliki gangguan kesehatan. Selain itu sebanyak 81.15% atau sebagian besar dari responden tidak melakukan kegiatan untuk menambah pendidikan mereka. Lebih dari setengahnya keadaan responden di Rw 06 tidak bekerja yaitu sebanyak 60.87%. Sedangkan 39,13% responden menyatakan bekerja. Pekerjaan responden terbagi-bagi lagi menjadi

sebanyak 0% bekerja sebagai petani kemudian hanya sebagian kecil responden bekerja sebagai pedagang yaitu 10.14%, selanjutnya pekerjaan buruh harian lepas merupakan pekerjaan yang persentasenya paling tinggi yaitu sebesar 21.74% kemudian 0% responden menjawab pekerjaan sebagai peternak dan sisanya sebanyak 7.25% menjawab memiliki pekerjaan lain-lain. Penghasilan responden sebagian besar sebesar Rp.1.200.000 sebanyak 97.02% responden menjawab seperti itu sedangkan 2.89% responden menyatakan berpenghasilan sebesar Rp. 740.000-940.000 per bulannya. Status kepemilikan rumah responden adalah sebagian besar milik sendiri yaitu sebanyak 97.02% responden berstatus sebagai pemilik rumah yang mereka tempati. Hanya sebagian kecil yaitu sebanyak 1.44% responden masih menempati rumah sewaan dan sebesar 1.44% responden menempati rumah bebas sewa.

Berdasarkan tingkat pendidikan pada kemiskinan absolut terdapat perbedaan antara SD, SMP, SMA. Dimana tingkat pendidikan SD cenderung memiliki kesehatan yang buruk karena masyarakat yang tingkat pendidikannya SD merupakan masyarakat yang mengalami kondisi tidak sehat tertinggi disbanding yang lain. Hal serupa juga dialami oleh masyarakat yang berpendidikan SD dimana angka tertinggi 46,37% masyarakat tersebut tidak melakukan usaha peningkatan pendidikan. Hal ini berdampak kepada pekerjaan sebanyak 43,47% masyarakat tidak bekerja adalah masyarakat yang dilatar belakangi oleh pendidikan terakhir SD.

4.2.2.2 Kemiskinan Relatif

Sebanyak 13.05% responden bersifat tertutup kepada para tetangganya. Hal ini berarti hanya sebagian kecil dari responden yang jarang bersosialisasi dengan tetangganya. Selanjutnya sebanyak 57.96% respnden mengaku bahwa keadaan rumah tangga responden lebih buruk disbanding keadaan rumah tangga sekitarnya.

Berdasarkan tingkat pendidikan, latar pendidikan SMA lah yang tertinggi persentasenya yaitu sebnayak 8,69% mengaku bersifat tertitip atau tidak aktif dalam bersosialisasi. Sedangkan masyarakat yang berpendidikan akhir SD merupakan masyarakat dengan persentase tertinggi yang mengaku keadaan rumah tangganya lebih buruk dengan masyarakat yang berpendidikan akhir SMP dan SMA.

4.2.2.3 Kemiskinan Kultural

Sebagian besar responden di RW 06 kelurahan jatihandap ini tidak memiliki potensi atau keahlian diri hal ini terbukti dengan jumlah jawaban sebanyak 94.21% responden menjawab demikian. Selain tidak mempunyai potensi diri kurang dari setengahnya responden yang tidak memiliki potensi diri ingin memiliki potensi diri. Selanjutnya sebanyak 95.66% responden tidak memiliki kebiasaan menabung.

Berdasarkan tingkat pendidikan kemiskinan kultural tertinggi adalah masyarakat yang berpendidikan akhir SD dimana masyarakat tersebut sebanyak 43,47% tidak memiliki potensi diri. Selanjutnya masyarakat yang berpendidikan akhir SD adalah masyarakat yang tidak memiliki kebiasaan menabung hal ini terbukti dengan sebanyak 44.92% menjawab demikian. Hal ini sejalan dengan masyarakat yang memiliki motivasi tinggi untuk memiliki potensi diri adalah masyarakat yang berpendidikan terakhir SD dengan 11.59%.

4.2.2.4 Kemiskinan Struktural

Tak seorang pun atau sebanyak 0% memberikan jawaban tentang kondisi alam sekitar Rw 06 Kelurahan Jatihandap ini buruk. Tetapi sebanyak 15.95% responden mengaku bahwa tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar.

Berdasarkan tingkat pendidikan responden yang paling tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam adalah responden yang tingkat pendidikannya adalah SMP yaitu sebanyak 8,69%.

4.2.3 Faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan masyarakat di Kelurahan Jatihandap

Dalam penelitian ini faktor penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat dibagi kedalam enam aspek. Keenam aspek tersebut adalah sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan dan personal/spiritual. Penjelasan mengenai keenam aspek tersebut akan dijelaskan secara lebih menyeluruh sebagai berikut

Tabel 4.6
 Faktor penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat berdasarkan aspek Sosial

No.	Faktor Penyebab	Tingkat Pendidikan Warmis						Σf	$\Sigma\%$
		SD		SMP		SMA			
		<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%		
	Pelayanan Sosial	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%		
1.	Responden tidak berpartisipasi dalam program pemerintah yang diadakan Kelurahan Jatihandap	18	26.08	17	24.63	12	17.39	47	68.12
2.	Alasan responden tidak dapat mengikuti program yang diadakan kelurahan Jatihandap	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	a. Kurangnya Biaya	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	b. Tidak terlalu suka dengan dunia luar	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Adanya kepentingan lain/sibuk bekerja	18	26.08	17	24.63	12	17.39	22	47.82
	d. Merasa sudah tidak kuat lagi berkegiatan								
	Balai Masyarakat	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	Σf	$\Sigma\%$
1.	Responden yang tidak tahu adanya balai masyarakat	15	21.73	2	2.89	0	0,0	17	24.64
	Perencanaan Sosial	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	Σf	$\Sigma\%$
1.	Responden yang tidak mengikuti kegiatan perencanaan sosial di balai masyarakat	18	26.08	17	24.63	12	17.39	47	68.12

No.	Kondisi Kemiskinan	Tingkat Pendidikan Warmis						Σf	$\Sigma\%$
		SD		SMP		SMA			
		<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%		
1.	Responden yang tidak melakukan sosialisasi dengan masyarakat lain	2	2,89	9	13,04	0	0,0	11	15,95
2.	Responden yang menganggap sosialisasi itu tidak penting	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Sumber : data diolah 2018

4.2.3.1 Faktor Sosial

Data diatas menunjukkan faktor penyebab kemiskinan dalam aspek sosial masyarakat Rw 06 Kelurahan Jatihandap. Berikut merupakan penjelasan dari faktor-faktor penyebab kemiskinan di Rw 06 Kelurahan Jatihandap

4.2.3.1.1 Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial sangat berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat karena jika baik pelayanan sosialnya maka lebih mudah untuk memberdayakan masyarakatnya. Aspek ini menjelaskan bahwa lebih dari setengah responden atau sebanyak 68.12% tidak berpartisipasi dalam program yang ada di Kelurahan Jatihandap. Responden menjawab lainnya sebanyak 47.82% ketika ditanya penyebab mereka memilih tidak berpartisipasi dalam program yang ada di Kelurahan. Sedangkan faktor kurangnya biaya, tidak terlalu suka dengan dunia luar, dan adanya kepentingan lain tak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan tersebut.

Berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam program pemerintahan adalah masyarakat yang berpendidikan akhir SD yaitu sebanyak 26.08%. hal ini dikarenakan masyarakat tersebut sudah tidak merasa kuat lagi untuk bekegiatan.

4.2.3.1.2 Balai Masyarakat

Adanya balai masyarakat sangat penting untuk pemberdayaan masyarakat, balai masyarakat dapat menjadi sarana untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat. Keberadaan balai masyarakat cukup diketahui oleh responden. Hal ini terbukti dengan responden yang tidak mengetahui keberadaan balai

masyarakat ada 24.64% atau hanya sebagian kecil masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan balai masyarakat.

4.2.3.1.3 Perencanaan Sosial

Perencanaan sosial penting kaitannya terhadap pemberdayaan masyarakat. Karena jika partisipasi masyarakat baik maka pemberdayaan bisa berjalan dengan baik pula. Namun pada kenyataannya sebanyak 68,12% masyarakat tidak mengikuti kegiatan perencanaan sosial.

Berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat yang paling banyak tidak mengikuti perencanaan sosial adalah masyarakat yang berpendidikan akhir SD yaitu sebanyak 26.08% selanjutnya adalah SMP dengan persentase 24,63% dan terakhir adalah SMA dengan persentase 17,38%.

4.2.3.1.4 Semangat Sosial

Hanya sebagian kecil yaitu sebanyak 15.95% responden mengaku tidak melakukan sosialisasi atau interaksi dengan masyarakat sekitar. Tetapi tidak ada seorang pun yang menjawab bahwa sosialisasi atau interaksi itu tidak penting. Selanjutnya faktor penyebab terjadinya kemiskinan akan dijelaskan berdasarkan aspek Ekonomi sebagai berikut :

Tabel 4.7
Faktor penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat berdasarkan aspek Ekonomi

No.	Faktor Penyebab	Tingkat Pendidikan Warmis						Σf	$\Sigma \%$
		SD		SMP		SMA			
		<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%		
1.	Di lingkungan Rw 06 tidak terdapat lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin	26	37.68	14	20.28	15	21.73	55	79.71
2.	Responden tidak memiliki pekerjaan yang dapat membantu perekonomian	30	43.47	22	31.88	15	21.73	67	97.10

3.	Alasan responden tidak memiliki pekerjaan sampingan a. Tidak mempunyai keterampilan untuk bekerja b. Malas Bekerja c. Merasa sudah tua	9 4 17	13,04 5,79 24,63	12 2 8	17,39 2,89 11,58	15 0 0	21,73 0,0 0,0	36 6 25	52,17 8,69 36,23
	Aktivitas Ekonomi Keluarga	f	%	f	%	f	%	Σf	Σ%
1.	Usia Kepala Keluarga a. 20-30 Tahun b. 31-40 Tahun c. 41-50 Tahun d. 51-60 Tahun e. > 61 Tahun	1 5 2 4 20	1,44 7,24 2,89 5,79 28,98	0 7 6 6 3	0,00 10,14 8,69 8,69 4,34	1 5 5 2 2	1,44 7,24 7,24 2,89 2,89	2 17 13 12 25	2,89 24,63 18,84 17,39 36,23
2.	Jumlah tanggungan yang dipikul keluarga a. 1 orang b. 2 orang c. 3 orang d. 4 orang e. > 4 orang	4 10 15 3 0	5,79 14,49 21,73 4,43 0,0	10 10 2 2 0	14,49 14,49 2,89 0,0 0,0	4 5 3 3 0	5,79 7,24 4,34 4,34 0,0	18 25 23 6 0	26,08 36,32 33,33 8,69 0,00
3.	Jenis pekerjaan kepala rumah tangga a. Petani b. Pedagang c. Buruh Harian Lepas d. Peternak e. Ibu rumah tangga f. Lainnya	0 0 8 0 20 4	0,00 0,00 11,59 0,00 31,88 5,79	0 2 18 0 4 0	0,00 2,89 26,08 0,00 5,79 0,00	0 3 7 0 1 7	0,00 4,34 10,14 0,00 1,44 10,14	0 5 33 0 25 11	0,00 7,25 47,82 0,00 36,23 15,94
4.	Jumlah anggota keluarga yang masih menempuh jenjang pendidikan a. Tidak ada b. 1 orang c. 2 orang d. 3 orang e. 4 orang f. > 4 orang	27 3 2 0 0 0	39,13 4,34 2,89 0,0 0,0 0,0	10 1 7 4 0 0	14,49 1,44 10,14 5,79 0,0 0,0	0 5 3 4 3 0	0,0 7,24 4,34 5,79 4,34 0,0	37 9 12 8 3 0	53,62 13,04 17,39 11,59 4,34 0,0
5.	Pengeluaran lebih besar daripada pendapatan	30	43,47	21	30,43	2	2,89	54	78,26

N o.	Faktor Penyebab	Tingkat Pendidikan Warmis						Σf	$\Sigma \%$
		SD		SMP		SMA			
		<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%		
1.	Di lingkungan Rw 06 tidak terdapat lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin	26	37,68	14	20,28	15	21,73	55	79,71
2.	Jenis bantuan yang responden terima								
	a. Raskin	6	8,69	6	8,69	8	11,59	20	28,98
	b. PKH	13	18,84	6	8,69	1	1,44	20	28,98
	c. BPNT	12	17,39	6	8,69	1	1,44	19	27,53

Sumber : data diolah 2018

4.2.3.2 Faktor Ekonomi

Tabel 4.7 mendeskripsikan faktor-faktor penyebab kemiskinan aspek ekonomi di RW 06 Kelurahan Jatihandap yang terbagi kedalam 4 bagian yaitu :

4.2.3.2.1 Lapangan Pekerjaan

Lapangan pekerjaan memiliki andil besar dalam meberdayakan masyarakat. Dengan adanya lapangan pekerjaan masyarakat memiliki peluang untuk lebih berdaya. Namun sebagian besar responden menyatakan bahwa di lingkungan RW 06 tidak terdapat lapangan pekerjaan yaitu sebanyak 79,71%. Selain tidak adanya lapangan pekerjaan responden di wilayah RW 06 juga menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pekerjaan yang dapat membenatu perekonomian mereka. Alasannya adalah karena mereka sudah tua (36,23% kemudian tidak mempunyai keterampilan untuk bekerja dalam bidang yang lain (52,17) dan merasa malas untuk bekerja (8,69%).

Berdasarkan tingkat pendidikan. Masyarakat yang berendidikan akhir Sd merupakan masyarakat yang memiliki persentase tertinggi dalam hal tidak memiliki pekerjaan yang dapat membantu perekonomian keluarga yaitu sebesar 43,47%

4.2.3.2.2 Aktivitas Ekonomi Keluarga

Kepala keluarga mempunyai pengaruh besar terhadap keluarga. Usia kepala keluarga warga miskin di wilayah RW 06 Kelurahan Jatihandap tertinggi adalah 36,23% yaitu kepla keluarga yang berusia >61 Tahun. Peringkat kedua adalah usia 31-40 tahun yaitu sebanyak 24,63% usia tersebut merupakan usia produktif.

Selanjutnya rentang usia 41-5- tahun ada 18,84%. Kemudian usia 51-60 tahun terdapat 17,39% dan persentase paling rendah adalah usia kepala keluarga 20-3- tahun yaitu sebanyak 2,89%.

Selain itu jumlah tanggungan yang dimiliki oleh keluarga merupakan kondisi aktivitas ekonomi keluarga. Bisa dilihat dari persentasenya bahwa jumlah tanggungan keluarga sebanyak 1 orang ada 26,08%.. selanjutnya jumlah tanggungan keluarga yang terdiri dari 2 orang sebanyak 36,31%. Hal itu merupakan angka tertinggi dari yang lainnya. Sedangkan yang memiliki jumlah tanggungan keluarga sebanyak 3 orang ada 33,33%. Selanjutnya tanggungan keluarga yang berjumlah 4 orang ada 8,69%.

Adapun lebih dari setengahnya (47,82%) jenis pekerjaan kepala rumah tangga warga miskin di RW 06 Kelurahan Jatihandap ini adalah Buruh Harian Lepas, selanjutnya ibu rumah tangga sebanyak 36,23%., Selain itu responden yang menjawab lainnya adalah 15,94%. Dan persentase terkecil adalah pedagang yaitu sebanyak 7,25%. Dan tidak ada seorang pun (0%) yang bekerja sebagai petani dan peternak.

Jumlah anggota keluarga yang masih sekolah mempengaruhi kondisi ekonomi warga miskin di RW 06. Lebih dari setengahnya (53,62%) warga miskin di RW 06 tidak memiliki tanggungan keluarga yang masih menempuh jenjang pendidikan. Selanjutnya sebanyak 13,04% responden menjawab ada anggota keluarganya yang menempuh jenjang pendidikan sebanyak 1 orang. Selanjutnya sebanyak 17,39% responden menjawab masih memiliki tanggungan keluarga yang masih menempuh pendidikan sebanyak 2 orang. Kemudian sebanyak 3 orang pelajar masih di tanggung oleh keluarga sebanyak 11,59%. Responden menjawab lebih besar pengeluaran daripada pendapatan sebanyak 78.26%.

Sebagian besar (76,81) warga miskin menerima bantuan dari pemerintah setempat. Bantuan tersebut berupa raskin (28,98%) PKH (28,98%) dan BPNT sebanyak 27,53% responden.

Berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pendidikan akhir SD merupakan masyarakat yang menjadi kepala keluarga memiliki jumlah tanggungan yang banyak dan bekerja sebagai ibu rumah tangga serta usia yang terbilang sudah tua. Hal ini menjadikan perekonomian masyarakat lebih besar pengeluaran daripada pendapatan sehingga banyaknya penerima jumlah bantuan pemerintah.

Tabel 4.8
 Faktor penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat berdasarkan aspek Politik

	Faktor Penyebab	Tingkat Pendidikan Warmis						Σf	$\Sigma \%$
		SD		SMP		SMA			
		<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%		
	Kekuasaan dalam politik	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%		
1.	Responden merasa kurang berperan bebas dalam mengaspirasikan pendapatnya di bidang politik	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Partisipasi Politik	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	Σf	$\Sigma \%$
1.	Responden tidak berperan aktif dalam kegiatan politik	31	44,92	12	17,39	10	14,49	53	76,81
2.	Alasan responden tidak berperan aktif dalam kegiatan politik								
	a. Tidak memiliki keahlian di bidang tersebut	0	0,0	11	15,94	0	0,0	11	15,94
	b. Tidak terlalu suka dengan dunia luar	10	0,0	0	0,0	15	0,0	0	0,0
	c. Adanya kepentingan lain(sibuk)	11	14,49	0	0,0	0	7,24	25	36,23
	d. Adanya rasa malas dalam diri untuk ikut serta dalam kegiatan	11	15,94	8	11,59	0	0,0	19	27,53
	e. Lainnya.....		15,94	3	4,34	0	0,0	14	20,28

Sumber : data diolah 2018

4.2.3.3 Faktor Politik

Data diatas merupakan faktor kemiskinan di RW 06 Kelurahan Jatihandap berdasarkan faktor politik yang terbagi menjadi 2 bagian, Yitu :

4.2.3.3.1 Kekuasaan dalam politik

Kekuasaan dalam politik memiliki pengaruh yang penting terhadap faktor kemiskinan. Namun data diatas menunjukkan bahwa tidak seorang pun (0%) responden menjawab bahwa dirinya tidak bebas dalam berpolitik. Artinya dalam pengalaman politik warga miskin di RW 06 sangat berperan bebas. Dalam hal ini tidak ada perbedaan tingkat pendidikan dalam menjalankan kekuasaan politik.

4.2.3.3.2 Partisipasi Politik

Sebagian besar (76,81%) menyatakan bahwa mereka tidak berperan aktif dalam kegiatan politik di kelurahan Jatihandap. Hal ini karena responden yang tidak memiliki keahlian di bidang tersebut sebanyak 15,94%, selanjutnya responden yang memiliki kepentingan lain sebanyak 36,23% selain itu alasan responden yang merasa malas untuk ikut serta dalam kegiatan sebanyak 27,53% dan responden yang menjawab lainnya sebanyak 20,28%.

Berdasarkan tingkat pendidikan. Masyarakat yang berpendidikan akhir Sekolah Dasar yang paling berpartisipasi dalam hal politik hal ini sesuai dengan persentase tertinggi yaitu tingkat pendidikan SD sebesar 44,92% selanjutnya SMP 17,39% dan terakhir SMA 14,49%.

Tabel 4.9

Faktor penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat berdasarkan aspek Budaya

No.	Faktor Penyebab	Tingkat Pendidikan Wajiris						Σf	$\Sigma \%$
		SD		SMP		SMA			
		<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%		
	Pelestarian dan penghargaan terhadap budaya lokal								
1	Responden yang berpendapat bahwa di RW 06 tidak terdapat lembaga yang mewadahi kebudayaan lokal	5	7.24	18	26.08	2	2.89	25	36.23
2.	Responden yang berpendapat bahwa di RW 06 terdapat lembaga yang mewadahi kebudayaan dan berpengaruh terhadap perekonomiannya	1	1.4	0	0,0	2	2.89	3	4.34

Sumber : data diolah 2018

4.2.3.4 Faktor Budaya

Dalam tabel 4.9 mendeskripsikan faktor-faktor penyebab kemiskinan aspek budaya di RW 06 Kelurahan Jatihandap yaitu :

4.2.3.4.1 Pelestarian dan Penghargaan terhadap Budaya Lokal

Budaya merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi kemiskinan. Dalam hal ini responden yang tidak

mengetahui di RW 06 terdapat lembaga yang mewarisi budaya lokal sebanyak 36,23%. Sedangkan responden yang mengetahui terdapatnya lembaga yang mewarisi budaya dan berpengaruh terhadap perekonomiannya sebesar 4,34%.

Berdasarkan tingkat pendidikan. Masyarakat SMP merupakan masyarakat yang berpendapat bahwa tidak terdapat lembaga yang mewadahi budaya lokal. Sehingga sebanyak 0% masyarakat yang ekonominya terpengaruhi oleh kebudayaan. Berbeda dengan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan SD yang mengaku mendapat pengaruh ekonomi dari budaya lokal sebesar 1,4% dan masyarakat SMA sebanyak 2,89%.

Tabel 4.10

Faktor penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat berdasarkan aspek Lingkungan

No.	Faktor Penyebab	Tingkat Pendidikan Warmis						Σf	$\Sigma \%$
		SD		SMP		SMA			
		<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%		
	Lingkungan eksternal dan internal								
1.	Responden yang beranggapan bahwa sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan RW 06 kurang potensial	30	43.47	21	30.43	2	2.89	54	78.26
2.	Lingkungan keluarga yang tidak mendukung satu sama lain	2	2.89	7	10.14	0	0,0	9	14.49
3.	Rasa ketidakbebasan dalam lingkungan bermasyarakat	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Sumber : data diolah 2018

4.2.3.5 Faktor Lingkungan

Data diatas mendeskripsikan faktor-faktor penyebab kemiskinan aspek ekonomi di RW 06 Kelurahan Jatihandap, yaitu :

4.2.3.5.1 Lingkungan internal dan eksternal

Sumber daya alam mampu mempengaruhi kemiskinan suatu masyarakat. Dimana jika sumber daya alam mampu dimanfaatkan masyarakat tersebut bisa berdaya dan tiak lagi menjadi masyarakat miskin. Sumber daya alam yang ada di RW 06 kurang berpotensi hal ini dibuktikan bahwa sebagian besar (78,26%) responden menjawab seperti itu. Selanjutnya responden dengan

keluarga yang tidak saling mendukung satu sama lain berjumlah 14.49%. Selain itu tidak seorang pun (0%) responden merasa dirinya tidak bebas dalam melakukan hubungan bermasyarakat

Tabel 4.11
Faktor penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat berdasarkan aspek Personal dan Spiritual

No.	Faktor Penyebab	Tingkat Pendidikan Warmis						Σf	$\Sigma \%$
		SD		SMP		SMA			
		<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%		
1.	Responden yang mengalami gangguan kesehatan sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan sehari hari	20	28,98	9	14,49	0	0,0	29	42,02
2.	Responden berdasarkan pengalaman pendidikan formal	32	46,38	22	31,89	15	21,73	69	100
3.	Responden yang tidak memiliki tempat tinggal milik sendiri	2	2,89	0	0,0	0	0,0	2	2,89
4.	Responden yang tidak mendapatkan perawatan ketika mengalami gangguan kesehatan	0	0,0	2	2,89	0	0,0	2	2,89
	Spiritual	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	Σf	$\Sigma \%$
1.	Tidak adanya komunitas keagamaan di lingkungan sekitar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2.	Responden tidak mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar	2	2,89	5	7,24	14	20,28	21	30,44

Sumber : data diolah 2018

4.2.3.6 Faktor Personal dan Spiritual

Data diatas mendeskripsikan faktor-faktor penyebab kemiskinan aspekpersonal dan spiritual di RW 06 Kelurahan Jatihandap, yaitu :

4.2.3.6.1 Personal

Aspek personal merupakan aspek yang mempengaruhi faktor penyebab kemiskinan. Dalam hal ini terdapat responden yang mengalami gangguan kesehatan dan mengganggu kegiatan sehari-hari sebanyak 42,02%. Selanjutnya responden yang tidak mendapatkan perawatan kesehatan ketika sakit terdapat 2,89% Selain itu tingkat pendidikan formal responden tertinggi adalah Sd (46,38%) tingkat kedua adalah SMP (31,89%) dan terakhir adalah SMA (21,73%). Adapun mengenai status penguasaan tempat tinggal sebanyak 2,89% responden yang belum memiliki tempat tinggal berstatus milik sendiri.

4.2.3.6.2

Di lingkungan RW 06 terdapat komunitas keagamaan hal ini di buktikan bahwa tidak ada seorang pun (0%) responden yang menjawab tidak adanya komunitas keagamaan di lingkungan sekitar. Adapun responden yang tidak aktif dalam kegiatan keagamaan adalah sebanyak 30,44%.

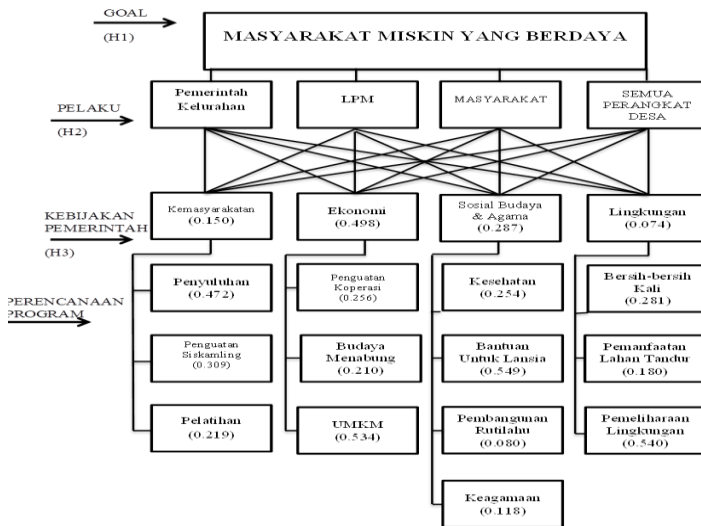
4.2.4 Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh LPM Kelurahan Jatihandap

4.2.4.1 Penyusunan Hierarki

Dalam Metode AHP, kriteria biasanya disusun dalam bentuk hierarki. Dibawah ini merupakan hierarki perencanaan pembererdayaan masyarakat miskin. Hal tersebut bertujuan untuk memprioritaskan program manakah yang akan diambil pada saat pelaksaaan program nantinya. Kriteria dan subkriteria dalam penelitian ini merupakan kriteria dan subkriteria yang dipakai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) . Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota oleh LPM (Lembega Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Jatihandap ini disusun dalam dua level hirarki. H1 meupakan tujuan atau goal. Level pertama adalah H2 yang berarti aspek kriteria program pemberdayaan masyarakat, dan level kedua adalah H3 yang berarti subkriteria.

\

Gambar 4.3
Struktur *Hierarchy* Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin



Sumber : Data diolah 2018

Hirarki pada gambar 4.3 tersebut memiliki beberapa tingkatan hirarki dengan batasan pengertian sebagai berikut :

Tingkat pertama (H1) : Yaitu hirarki yang menjelaskan mengenai tujuan utama atau yang disebut dengan goal adalah tujuan utama dari perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin kelurahan Jatihandap

Tingkat kedua (H2) : yaitu hirarki yang menjelaskan pelaku atau aktor dari program tersebut. Semua pelaku ikut berperan serta dalam perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin ini sehingga tidak ada penilaian karena semua pelaku dianggap sama penting nilainya.

Tingkat ketiga (H3) : yaitu hirarki yang menjelaskan mengenai beberapa aspek atau kriteria atau kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat miskin di Kelurahan Jatihandap. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jatihandap memiliki kebijakan yang terdiri dari empat kriteria yaitu :

a. Kemasyarakatan, kemasyarakatan merupakan aspek yang terpenting dalam memberdayakan masyarakat. Karena melalui kemasyarakatan maka seseorang akan menumbuhkan rasa

solidaritas. Dalam hal ini pemberdayaan melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Kondisi tersebut mencerminkan perlu adanya pergeseran peran pemerintah yang signifikan dari peran sebagai penyelenggara pelayanan sosial menjadi fasilitator, mediator, pemungkin, pendidik, mobilisator, system pendukung dan peran lain yang mengarah kepada pelayanan tidak langsung. maka dari itu dalam kebijakan pemerintah berkaitan dengan kriteria kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menentukan sub kriteria untuk kriteria kemasyarakatan yaitu :

1. Penyuluhan;
2. Penguatan Siskamling; dan
3. Pelatihan

b. Ekonomi, ekonomi erat kaitannya dengan pemberdayaan. Jika masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang baik maka sudah pasti masyarakat tersebut memiliki power atau berdaya. Dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki sub kriteria dalam kriteria ekonomi adalah :

1. Penguatan Koperasi;
2. Budaya Menabung; dan
3. UMKM.

c. Sosial Budaya dan Agama, hal ini sangat berpengaruh bagi pemberdayaan masyarakat karena kriteria sosial budaya dan agama bertujuan untuk pelayanan kepada masyarakat. Kriteria ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sehingga jika kualitas hidup masyarakat meningkat maka masyarakat tersebut akan berdaya. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki subkriteria sebagai berikut :

1. Kesehatan;
2. Bantuan untuk lansia;
3. Pembanguna Rutilahu; dan
4. Kegamaan

d. Lingkungan, lingkungan merupakan aspek yang penting dalam bermasyarakat karena masyarakat itu sendiri hidup di dalam lingkungan. Lingkungan dapat berubah sesuai dengan masyarakat sekitar. Sehingga jika ingin menjadikan masyarakat sekitar berdaya maka lingkungan pun harus di perbaiki. Sub kriteria lingkungan ada tiga yaitu :

1. Bersih-bersih kali
2. Pemanfaatan lahan tandur
3. Pemeliharaan lingkungan

4.2.4.2 Matriks pire-wise (Matriks Perbandingan Berpasangan) dan Matriks Priority (Prioritas) perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin

Agar diperoleh bobot dari masing-masing kriteria maka diperoleh nilai tabel skala perbandingan berpasangan. Nilai ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden. Responden berasal dari LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

4.2.4.2.1 Matriks Pire-Wise (Matriks Perbandingan Berpasangan) perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin

Tabel 4.12

Matriks Perbandingan Berpasangan perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin

KRITERIA	Kemasyarakatan	Ekonomi	Sosbud&Agma	Lingkungan
Kemasyarakatan	1.000	0.274	0.299	3.297
Ekonomi	3.650	1.000	2.308	5.121
Sobud&Agama	3.344	0.433	1.000	3.332
Lingkungan	0.303	0.195	0.300	1.000
jumlah	8.297	1.903	3.907	12.750

Sumber : data diolah 2018

Dari hasil penghitungan perbandingan antar kriteria perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin di Kelurahan Jatihandap diperoleh bobot seperti pada tabel 4.13 dibawah ini :

Tabel 4.13

Matriks Priority (Prioritas) perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin

KRITERIA	K	E	SBA	L	JML	PV	RK
Kemasyarakatan	0.121	0.144	0.077	0.259	0.600	0.150	III
Ekonomi	0.440	0.526	0.591	0.402	1.958	0.489	I
Sosial Budaya	0.403	0.228	0.256	0.261	1.148	0.287	II
Lingkungan	0.037	0.103	0.077	0.078	0.294	0.074	IV
jumlah	1	1	1	1	4		

Sumber : data diolah 2018

Keterangan :

- K : Kemasyarakatan
 E : Ekonomi
 SBA : Sosial Budaya dan Agama
 L : Lingkungan
 JML : Jumlah
 PV : Priority Vector
 RK : Ranking

Data diatas menunjukkan bahwa untuk melakukan perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin kriteria yang pertama adalah Ekonomi dengan bobot 0.489 selanjutnya adalah Sosial Budaya & Agama dengan bobot 0.287. Kriteria selanjutnya adalah kemasyarakatan dengan bobot 0.150. Dan yang terakhir adalah kriteria lingkungan dengan bobot 0.074

4.2.4.2.2 Matriks Pire-Wise (Matriks Perbandingan Berpasangan) perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin aspek Kemasyarakatan

Tabel 4.14
 Matriks Perbandingan Berpasangan aspek Kemasyarakatan

KEMASYARAKATAN	Penyuluhan	Penguatan Siskamling	Pelatihan
Penyuluhan	1.000	4.122	1.084
Penguatan Siskamling	0.243	1.000	3.534
Pelatihan	0.923	0.283	1.000
Jumlah	2.165	5.405	5.618

Sumber : data diolah 2018

Dari hasil penghitungan perbandingan antar kriteria perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin aspek kemasyarakatan di Kelurahan Jatihandap diperoleh bobot seperti pada tabel 4.15 dibawah ini :

Tabel 4.15
Matriks Prioritas Aspek Kemasyarakatan

KEMASYARAKATAN	PNY	PS	PLTH	JML	PV	RK
Penyuluhan	0.462	0.763	0.193	1.417	0.472	I
Penguatan Siskamling	0.112	0.185	0.629	0.926	0.309	II
Pelatihan	0.426	0.052	0.178	0.656	0.219	III
Jumlah	1	1	1	3		

Sumber : data diolah 2018

Keterangan :

PNY : Penyuluhan

PS : Penguatan Siskamling

PLTH : Pelatihan

JML : Jumlah

RK : Ranking

Data diatas menunjukkan prioritas utama dalam aspek kemasyarakatan adalah penyuluhan dengan bobot 0.472. Selanjutnya pada prioritas kedua adalah Penguatan siskamling dengan jumlah bobot 0.309. Adapun prioritas terakhir dari aspek kemasyarakatan adalah pelatihan dengan bobot 0.219.

4.2.4.2.3 Matriks Pire-Wise (Matriks Perbandingan Berpasangan) perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin aspek ekonomi

Tabel 4.16
Matriks Perbandingan Berpasangan aspek Ekonomi

EKONOMI	Penguatan Koperasi	Budaya Menabung	UMKM
Penguatan Koperasi	1.000	1.161	0.504
Budaya Menabung	0.861	1.000	0.373
UMKM	1.984	2.681	1.000
Jumlah	3.845	4.842	1.877

Sumber : data diolah 2018

Dari hasil penghitungan perbandingan antar kriteria perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin aspek ekonomi di Kelurahan Jatihandap diperoleh bobot seperti pada tabel 4.17 dibawah ini :

Tabel 4.17
Matriks Prioritas Aspek Ekonomi

EKONOMI	Penguatan Koperasi	Budaya Menabung	UMKM	Jumlah	Priority Vector	RK
Penguatan Koperasi	0.260	0.240	0.269	0.768	0.256	II
Budaya Menabung	0.224	0.207	0.199	0.629	0.210	III
UMKM	0.516	0.554	0.533	1.602	0.534	I
Jumlah	1	1	1	3		

Sumber : data diolah 2018

Data diatas menunjukkan bahwa prioritas utama perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin aspek ekonomi adalah UMKM dengan bobot 0.534. Selanjutnya pada tingkat kedua adalah pengutan koperasi dengan bobot 0.256. Terakhir adalah budaya menabung dengan bobot 0.210

4.2.4.2.4 Matriks Pire-Wise (Matriks Perbandingan Berpasangan) perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin aspek sosial budaya dan agama

Tabel 4.18
Matriks Perbandingan Berpasangan aspek Sosbud dan Agama

SOSBUD & AGAMA	Penyuluhan Kesehatan	Bantuan Lansia	Pembangunan rutilahu	Acara keagamaan
Penyuluhan kesehatan	1.000	0.278	3.269	3.323
Bantuan lansia	3.597	1.000	5.256	4.076
Pembangunan rutilahu	0.306	0.190	1.000	0.556
Acara Keagamaan	0.301	0.245	1.799	1.000
Jumlah	5.204	1.714	11.324	8.955

Sumber : data diolah 2018

Dari hasil penghitungan perbandingan antar kriteria perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin aspek sosial budaya dan agama di Kelurahan Jatihandap diperoleh bobot seperti pada tabel 4.19 dibawah ini :

Tabel 4.19
Matriks Prioritas Aspek Sosial Budaya dan Agama

SOSBUD & AGAMA	PK	BL	PR	AK	JML	PV	RK
Penyuluhan kesehatan	0.192	0.162	0.289	0.371	1.014	0.254	II
Bantuan lansia	0.691	0.584	0.464	0.455	2.194	0.549	I
Pembangunan rutilahu	0.059	0.111	0.088	0.062	0.320	0.080	IV
Acara Keagamaan	0.058	0.143	0.159	0.112	0.472	0.118	III
Jumlah	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000		

Sumber : data diolah 2018

Keterangan :

PK : Penyuluhan Kesehatan

BL : Bantuan Lansia

PR : Pembangunan Rutilahu

AK : Acara Keagamaan

JML : Jumlah

PV : Priority Vector

RK : Ranking

Data diatas menunjukkan bahwa prioritas pertama aspek ekonomi adalah bantuan lansia yang memiliki bobot sebesar 0.549. Selanjutnya adalah penyuluhan kesehatan dengan bobot 0.254. Adapun prioritas ketiga adalah acara keagamaan dengan bobot 0.118 dan prioritas terakhir adalah pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu) dengan bobot sebesar 0.080.

4.2.4.2.5 Matriks Pire-Wise (Matriks Perbandingan Berpasangan) perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin aspek lingkungan

Tabel 4.20

Matriks Perbandingan Berpasangan aspek lingkungan

LINGKUNGAN	Bersih-bersih kali	Pemanfaatan lahan tandur	Pemeliharaan lingkungan
Bersih-Bersih kali	1.000	1.307	0.618
Pemanfaatan lahan Tandur	0.765	1.000	0.274
Pemeliharaan Lingkungan	1.618	3.650	1.000
Jumlah	3.383	5.957	1.892

Sumber : data diolah 2018

Dari hasil penghitungan perbandingan antar kriteria perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin aspek lingkungan di Kelurahan Jatihandap diperoleh bobot seperti pada tabel 4.21 dibawah ini

Tabel 4.21
Matriks Prioritas Aspek Lingkungan

LINGKUNGAN	BK	PLT	PL	JML	PV	RK
Bersih-Bersih kali	0.296	0.219	0.327	0.842	0.281	II
Pemanfaatan lahan Tandır	0.226	0.168	0.145	0.539	0.180	III
Pemeliharaan Lingkungan	0.478	0.613	0.529	1.620	0.540	I
Jumlah	1	1	1	3		

Sumber : data diolah 2018

Keterangan :

BK : Bersih-bersih Kali

PLT : Pemanfaatan Lahan tandur

PL : Pemeliharaan Lingkungan

JML : Jumlah

PV : Priority Vector

RK : Ranking

Pada aspek lingkungan prioritas utama adalah pemeliharaan lingkungan dengan bobot 0.540. Selanjutnya adalah bersih-bersih kali dengan bobot 0.281 dan terakhir adalah pemanfaatan lahan tandur dengan bobot 0.180.

4.2.4.3 Konsistensi

Dengan menggunakan AHP yang memaknai persepsi manusia sebagai inputnya maka ketidak konsistenan mungkin terjadi karena manusia memiliki keterbatasan dalam menyatakan persepinya secara konsisten terutama jika harus membandingkan banyak kriteria. Berdasarkan kondisi ini maka manusia dapat menyatakan persepinya tersebut apakah akan konsisten atau tidak konsisten.

Pengukuran konsistensi dalam metode AHP ini dimaksudkan untuk melihat konsistensi responden. Jika $CR < 0,1$ maka nilai konsistensi yang diberikan kepada matriks berpasangan adalah konsisten. Tetapi jika $CR > 0,1$ maka nilai konsistensi yang diberikan kepada matriks berpasangan adalah tidak konsisten. Sehingga pengisian matriks berpasangan harus diulang. Pada tabel

4.22 berikut ini menunjukkan nilai konsistensi rasio (CR) dari penilaian responden.

Tabel 4.22
Konsistensi Rasio (CR) Penilaian Responden

Pire-Wise (perbandingan berpasangan)	CR	Keterangan
Perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin	0.049	KONSISTEN
Perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin aspek Kemasyarakatan	0.962	KONSISTEN
Perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin aspek Ekonomi	0.002	KONSISTEN
Perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin aspek Sosial Budaya dan Agama	0.038	KONSISTEN
Perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin aspek Lingkungan	0.039	KONSISTEN

Sumber : data diolah 2018

Tabel diatas menunjukkan $CR < 0,1$ yang berarti konsisten sehingga penilaian responden tidak perlu diulang lagi.

4.3 Pembahasan hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dikemukakan pembahasan hasil penelitian yang berkaitan dengan gambaran kemiskinan kemudian faktor apa yang menyebabkan kemiskinan selanjutnya tentang perencanaan pemerintah kelurahan Jatihandap untuk memberdayakan masyarakat miskin kota di RW 06 Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut :

4.3.1 Gambaran Kemiskinan di Kelurahan Jatihandap

Dalam tabel 4.5 kemiskinan absolut mempunyai beberapa kriteria yaitu kesehatan pendidikan pekerjaan pendapatan serta sandang pangan dan papan. Seseorang dikatakan mengalami kondisi kemiskinan absolut jika kriteria-kriteria tersebut dipenuhi. Hal ini serupa dengan pendapat Chambers dalam Ali Khomsan dkk (2015:3) Kemiskinan absolut adalah bila pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk

bisa hidup dan bekerja. Dalam hal ini kemiskinan yang ada di Kelurahan Jatihandap bukan merupakan kemiskinan absolut karena terdapat kriteria yang tidak dipenuhi yaitu kriteria pendapatan masyarakat miskin di RW 06 ini adalah sebagian besar (97.02%) sebesar Rp.1.200.000 dimana jika seseorang dikatakan dalam kondisi miskin absolut jika pendapatannya dibawah garis kemiskinan. Dalam hal ini garis kemiskinan di gambarkan oleh Bank Dunia sebesar \$1 per hari.

Masyarakat miskin di Kelurahan Jatihandap merupakan masyarakat yang tidak terisolasi hal ini dibuktikan karena hanya sebagian kecil masyarakat miskin Kelurahan Jatihandap atau sebanyak 13.05% mengaku bersifat tertutup dan anti sosial yang berarti 86.95%(sebagian besar) masyarakat miskin di Kelurahan Jatihandap melakukan interaksi sosial dengan tetangga sekelilingnya. Meskipun sebanyak 57.96% responden mengaku bahwa keadaan rumah tangga mereka lebih buruk dibandingkan dengan lingkungan di sekitarnya. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa kemiskinan di Kelurahan Jatihandap bukan kemiskinan yang relatif. Menurut Chambers dalam Naskun dalam Ali Khomsan dkk (2015:3) menyebutkan kemiskinan relatif adalah kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada di bawah masyarakat sekitarnya. Kemiskinan relatif ini erat kaitannya dengan kesenjangan dan masalah pembangunan yang sifatnya struktural. Kemiskinan ini biasa menyebut orang-orangnya sebagai orang yang tertinggal dan terisolasi. Dimana orang yang terisolasi adalah orang yang jauh dengan sosial.

Dengan data sebanyak 15,95% responden menjawab bahwa tidak dapat memanfaatkan sumber daya yang ada hal ini berarti hanya sebagian kecil masyarakat miskin di Kelurahan Jatihandap mengalami hal demikian. Masyarakat miskin di Kelurahan Jatihandap tidak memenuhi kriteria dari kemiskinan struktural dimana kemiskinan struktural memiliki kriteria rendahnya akses terhadap sumber daya. Adapun kemiskinan struktural yang memiliki arti situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu system sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi menyebabkan suburnya kemiskinan (Khomsan 2015:3).

Masyarakat dengan kondisi kemiskinan kultural bersifat pasrah dengan dirinya sehingga menganggap dirinya miskin keturunan. Kemiskinan ini membuat dirinya hanya berdiam saja tidak ingin mengubah nasib. Dalam hal ini di Kelurahan Jatihandap dapat dikatakan kemiskinan kultural karena dari data yang didapat terdapat 94.21% yang berarti hampir semuanya mengaku bahwa tidak ada potensi dalam dirinya. Hal ini menyebabkan mereka pasrah dalam keadaan dan tidak ingin mengubah nasib mereka. Sifat ini juga mencerminkan sifat malas dan tidak kreatif. Selain itu sebanyak 95.66% masyarakat miskin di RW 06 mengaku bahwa mereka tidak memiliki kebiasaan menabung. Hal ini menyatakan bahwa masyarakat miskin di RW 06 mempunyai kebiasaan yang boros. Sehingga dapat dikatakan bahwa keadaan masyarakat miskin di RW 06 adalah miskin kultural. Hal ini sesuai dengan kemiskinan kultural yang berarti kemiskinan tersebut mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar (Khomsan 2015:3).

Jadi keadaan masyarakat miskin di RW 06 Kelurahan Jatihandap merupakan kemiskinan kultural dimana kemiskinan tersebut muncul dari adanya budaya malas dari dalam diri mereka sendiri. Selain malas masyarakat miskin di RW 06 Kelurahan Jatihandap merupakan masyarakat yang boros. Masyarakat miskin RW 06 kurang dapat memberdayakan dirinya sendiri sehingga kehidupan masyarakat miskin RW 06 cenderung statis.

4.3.2 Faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan masyarakat di Kelurahan Jatihandap

Selain mengidentifikasi gambaran kemiskinan kota di Kelurahan Jatihandap peneliti juga melakukan penelitian tentang faktor penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat kota di RW 06 Kelurahan Jatihandap. Lebih jelasnya pemaparan mengenai faktor penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat kota di RW 06 Kelurahan Jatihandap akan dijelaskan sebagai berikut :

4.3.2.1 Aspek Sosial

Tabel 4.6 diatas menggambarkan faktor kemiskinan masyarakat berdasarkan aspek sosial adalah karena beberapa faktor berikut :

4.3.2.1.1 Pelayanan Sosial

Menurut Ife dan Tesoriero (2008:415) pelayanan sosial bukan untuk mendirikan layanan yang lain atau yang baru. Tetapi pelayanan sosial untuk membantu pelayanan yang sudah ada agar berfungsi lebih efektif dengan perencanaan yang lebih baik. Oleh karena itu, hasil dari proses tersebut merupakan terbentuknya struktur atau perencanaan koordinasi yang baru. Idealnya hal ini sangat membutuhkan partisipasi masyarakat di dalamnya.

Sebagai pemerintahan kelurahan jatihandap tentunya mempunyai program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakatnya. Sudah pasti di Kelurahan Jatihandap juga memiliki kegiatan atau program pembangunan yang dapat memberdayakan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Hikmat (2008:52) yang mengatakan bahwa pelayanan sosial dalam arti luas mencakup beberapa pembangunan. Juga mencakup ruang lingkup pembangunan kesejahteraan rakyat yang merupakan subsistem pembangunan nasional. Kamerman dan Kahn (1979) dalam Hikmat (1979) menjelaskan enam komponen atau subsistem kesejahteraan sosial dalam arti luas, yaitu (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) pemeliharaan penghasilan, (4) pelayanan kerja, (5) perumahan, dan (6) pelayanan sosial personal (*personal social services*).

Namun, pada kenyataannya masyarakat miskin di Kelurahan Jatihandap lebih dari setengahnya (68.12%) tidak berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan yang ada di Kelurahan Jatihandap. Tidak dapat berpartisipasi masyarakat miskin di kelurahan Jatihandap adalah karena merasa sudah tidak kuat lagi berkegiatan. Hal tersebut dikemukakan responden sebanyak 47.82%.

4.3.2.1.2 Balai masyarakat

Ife dan tesoriero (2008:418-419) balai masyarakat atau *neighbourhood house* merupakan tempat yang dipergunakan untuk perawatan anak, pendidikan, pengembangan keterampilan, informasi dan penyerahan, diskusi kelompok dan lain sebagainya. Agar balai masyarakat berfungsi dengan efektif orang-orang setempat harus memiliki kontrol yang besar terhadap pelaksanaannya dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Dengan teori diatas dapat dikatakan bahwa balai masyarakat memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Masyarakat memiliki peran penting untuk memonitoring kegiatan yang ada di balai masyarakat. Namun, pada

kenyataannya sebagian kecil 24,64% masyarakat miskin tidak mengetahui adanya balai masyarakat.

4.3.2.1.3 Perencanaan Sosial

Menurut Ife dan Tesoriero (2008:419-420) dalam konteks pengembangan masyarakat, istilah perencanaan sosial seharusnya tidak dipahami sebagai rencana besar atau aktivitas yang sangat teknis yang dinyatakan secara tidak langsung dalam model B Rothman (1974) dalam tipologi praktik organisasi banyak dikutipnya. Lebih dari itu, perencanaan sosial merupakan proses orang-orang di sebuah masyarakat yang membatasi kebutuhan mereka dan merencanakan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan mereka maupun mengoordinasikan pelayanan sumber daya yang ada menggunakannya secara maksimal. Proses perencanaan pada umumnya dilakukan oleh perwakilan nonpemerintah, seperti dewan perencanaan sosial, dewan pengembangan sosial atau dewan perencanaan sosial.

Dari teori diatas dapat dikatakan bahwa perencanaan sosial dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya pemerintah masyarakat juga mengikuti kegiatan perencanaan. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam hal ini. Namun, pada kenyataannya lebih dari setengahnya (68,12%) masyarakat miskin di Kelurahan Jatihandap tidak mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan sosial di balai masyarakat.

4.3.2.1.4 Semangat Sosial

Ife dan tesoriero (2008:420-421) mengatakan bahwa pengembangan sosial juga dapat berfokus pada kualitas interaksi sosial yang sesungguhnya dalam suatu masyarakat, bukan secara langsung berfokus pada ketersediannya pelayanan kemanusiaan. Oleh karena itu program pengembangan sosial hanya memberikan fasilitas kepada orang-orang dalam masyarakat untuk saling berbicara dan berinteraksi lebih besar dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Berkaitan dengan teori tersebut sebagian kecil masyarakat miskin di Kelurahan Jatihandap memiliki semangat sosial yang rendah hal ini terbukti dengan sebanyak 15.95% responden yang menjawab tidak melakukan sosialisai dengan masyarakat lain.

Berdasarkan empat aspek yang telah dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa persentase tertinggi faktor penyebab kemiskinan masyarakat kota di Kelurahan Jatihandap adalah

responden yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan dan responden yang tidak mengikuti kegiatan perencanaan sosial. Dalam hal ini, masyarakat miskin di kelurahan Jatihandap bersifat kurang berpartisipasi dengan hal yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Adapun persentase terendah dari faktor penyebab kemiskinan masyarakat kota di Kelurahan Jatihandap adalah responden yang tidak melakukan sosialisasi dengan masyarakat lain.

4.3.2.2 Aspek Ekonomi

Menurut Ife dan tesoriero (2008:425) terdapat potensi yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya, inisiatif dan tenaga ahli lokal untuk membangun industri lokal baru yang akan dimulai dan dijalankan oleh orang-orang yang ada di masyarakat lokal. Banyak program pengembangan ekonomi masyarakat lokal menggunakan bentuk ini dan program-program tersebut dapat berhasil dalam mengembangkan aktivitas ekonomi serta menjadi kebanggaan dalam prestasi lokal. Namun, pada kenyataannya masyarakat miskin di Kelurahan jatihandap tidak mampu memanfaatkan potensi lokal yang ada hal ini terbukti dengan lebih dari setengahnya (52,17%) responden alasan tidak memiliki pekerjaan sampingan adalah menjawab tidak mempunyai keterampilan untuk bekerja.

Selain itu Tabel 4.7 diatas menggambarkan faktor kemiskinan masyarakat kota berdasarkan aspek ekonomi adalah karena beberapa fakto berikut :

4.3.2.2.1 Lapangan Pekerjaan

Sebagian besar (79,71%) responden menjawab di lingkungan Rw 06 kelurahan Jatihandap tidak terdapat lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin. Sebagian besar (97.01%) juga menjawab tidak memiliki pekerjaan sampingan yang dapat membantu perekonomian keluarga. Hal itu dikarenakan lebih dari setengahnya responden menjawab tidak mempunyai keterampilan untuk bekerja (52,17%). Sebagian kecil (8,69%) responden menjawab malas untuk bekerja dan kurang dari setengahnya(36,23) responden merasa sudah tidak kuat untuk bekerja (sudah tua).

4.3.2.2.2 Aktivitas Ekonomi Keluarga

Jenis pekerjaan kepala rumah tangga terbesar adalah sebagai buruh harian lepas yaitu sebesar 47,82%. Peran kepala keluarga sangat penting terkait dengan perekonomian keluarga. Begitu juga dengan usia kepala keluarga yang berengaruh terhadap efektifitas kerja. Kenyataan dilapangan bahwa persentase terbesar

kepala keluarga merupakan lansia dimana sebanyak 36,23% merupakan kepala keluarga yang berusia >61 tahun. Usia tersebut merupakan bukan usia produktif. Selain tidak produktif usia kepala keluarga yang >60 tahun akan sangat bergantung kepada orang lain. Hal ini juga akan sangat tidak produktif mengingat persentase terbesar pekerjaan kepala rumah tangga adalah sebagai buruh harian lepas dimana pekerjaan tersebut membutuhkan tenaga yang lebih untuk mengerjakannya.

Jumlah tanggungan keluarga juga merupakan hal yang berpengaruh pada ekonomi keluarga. Semakin banyak jumlah anggota keluarga yang ditanggung akan semakin besar pula biaya pengelurannya. Kondisi terbanyak jumlah tanggungan masyarakat miskin di Rw 06 Kelurahan Jatihandap adalah sebanyak 36,32% berjumlah 2 orang. Sebanyak 33,33% berjumlah 3 orang. Sebanyak 26,08% berjumlah 1 orang dan sebanyak 8,68% berjumlah 4 orang. Selain jumlah tanggungan ada juga hal yang sangat berpengaruh terhadap pekeonomian keluarga yaitu jumlah anggota keluarga yang menempuh pendidikan. Di mana yang kita ketahui bahwa pendidikan selalu membutuhkan biaya di dalamnya. Namun persentase terbesar adalah tidak adanya anggota keluarga yang masih menempuh jenjang pendidikan sebanyak 53,62%. Hal ini bukan berate tidak ada, masih terdapat keluarga yang menanggung anggota keluarga yang masih berpendidikan sebanyak 1 orang adalah sebesar 13,04%. 2 orang sebanyak 17,39%. 3 orang sebanyak 11,59%. Dan 4 orang sebanyak 4,34%. Hal tersebut sangat berkaitan dengan jumlah pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Sebagian besar (78,26%) responden menjawab bahwa pengeluaran keluarga mereka lebih besar daripada pendapatan yang mereka terima

4.3.2.2.3 Bantuan Pemerintah

Menurut Ife dan Tesoriero (2008:422-423) pengaruh globalisasi ekonomi terlihat pada jumlah kemiskinan yang meningkat yang tercermin tidak saja dalam statistik garis kemiskinan, tetapi juga dalam angka ketergantungan pada pertolongan darurat seperti bantuan makanan, uang tunai, emergensi, lumbung pangan dll. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat miskin di Kelurahan Jatihandap dimana sebagian besar (76,81) responden mendapat bantuan dari pemerintah berupa raskin, PKH, dan BPNT.

Berdasarkan ketiga faktor diatas persentase tertinggi adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki pekerjaan yang dapat membantu perekonomian keluarga. Sedangkan persentase terendah yaitu usia kepala keluarga 20-30 tahun sebesar 2,89%

4.3.2.3 Aspek Politik

Ife dan Tesoriero (2008: 437) mengatakan pengembangan politik berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam arena politik, dan ditunjukan untuk meningkatkan kekuasaan baik dalam masyarakat secara menyeluruh maupun perseorangan dan kelompok dalam masyarakat itu untuk memberikan kontribusi dalam proses masyarakat, aktivitas dan keputusan.

Terkait dengan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa kekuasaan dalam masyarakat berhubungan dengan partisipasi responden di bidang politik. Pada kenyataannya, sebagian besar (76,81) responden menjawab bahwa mereka tidak berperan aktif dalam kegiatan politik. Hal itu dikarenakan sebanyak 15,94% responden menjawab tidak memiliki keahlian di bidang tersebut. Selanjutnya sebanyak 36,23% menjawab karena sibuk. Sebanyak 27, 53% menjawab malas dan sebanyak 20,28% responden tidak mengatakan alasannya.

4.3.2.4 Aspek Budaya

Tradisi budaya lokal merupakan bagian penting dalam menanamkan rasa bermasyarakat dan membantu memberikan rasa identitas kepada masyarakat. Menurut Ife dan Tesoriero (2008:448) untuk menghadapi globalisasi budaya, sangat sulit bagi masyarakat untuk melestarikan budaya lokal mereka sendiri yang menjadi keunikan wilayahnya, namun globalisasi budaya ini merupakan komponen penting dalam pengembangan masyarakat. Prinsip keanekaragaman menghendaki bahwa keanekaragaman budaya dipertahankan itulah budaya yang memberikan identitas dan rasa memiliki kepada orang-orang sehingga pengembangan budaya sangat penting.

Tabel 4.9 menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan teori tersebut diketahui bahwa sebagian kecil (36,23%) responden menyatakan bahwa di rw 06 Kelurahan jatihandap tidak terdapat lembaga yang mewadahi budaya lokal. Dan sebanyak 4,34% masyarakat miskin di rw 06 Kelurahan jatihandap berpendapat bahwa kebudayaan data memengaruhi perekonomiannya.

4.3.2.5 Aspek Lingkungan

Ife dan tesoriero(2008:469) mengatakan bahwa lingkungan merupakan komponen penting dari masyarakat dan perlu dicakup dalam pendekatan terpadu terhadap pengembangan masyarakat. Pendekatan ini berlaku untuk lingkungan alam maupun lingkungan buatan.

Data pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa kemiskinan yang terjadi di Rw 06 keurahan Jatihandap karena adanya sebagian masyarakat miskin (78.26%) yang beranggapan bahwa sumber daya alam yang ada di Rw 06 kurang potensial. Selain lingkungan alam terdapat lingkungan buatan atau bisa disebut dengan lingkungan keluarga. Keluarga sebagai unit satuan terkecil memiliki peranan penting dalam menciptakan pemberdayaan. Menurut Jauhari (Fahrudin, 2005 : 101) keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelomponya. Akan tetapi sebagian kecil (78.265%) dari responden menjawab bahwa lingkungan keluarga tidak mendukung satu sama lain.

4.3.2.6 Personal dan Spiritual

Tabel 4.11 diatas menggambarkan faktor kemiskinan masyarakat kota berdasarkan aspek personal dan spiritual adalah karena beberapa faktor berikut :

4.3.2.6.1 Personal

Menurut Ife dan Tesoriero (2008:474) pengembangan sosial menekankan pada pengembangan dan pemberian pelayanan kemanusiaan seperti kesehatan, pendidikan, perumahan dan perawatan orang-orang yang memerlukan asuhan. Pelayanan tersebut ditujukan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga pelayanan ini menjadi komponen dari agenda pengembangan personal.

Berdasarkan teori tersebut sebesar 42,02% responden mengalami gangguan kesehatan dan responden yang mendapatkan perawatan ketika mengalami gangguan kesehatan hanya sebagian kecil yaitu sebanyak 2,89%. Berkenaan dengan pengalaman pendidikan formal responden dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 46,38% angka tersebut paling tinggi dibanding yang lain. Selanjutnya responden dengan tingkat pendidikan SMP sebesar 31,89%. Adapun responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA yaitu sebesar 21,73%. Mengenai status penguasaan tempat tinggal.

Sebagian kecil (2,89%) responden menjawab tidak memiliki tempat tinggal sendiri.

Hal ini berarti bahwa masyarakat miskin di Jatihandap memiliki angka yang cukup baik untuk aspek spiritual. Terbukti dengan rendahnya masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan.

4.3.2.6.2 Spiritual

Spiritual erat kaitannya dengan keagamaan. Dalam hal ini responden yang tidak mengikuti kegiatan keagamaan berjumlah 30,44%. Hal ini berarti masyarakat di Kelurahan Jatihandap merupakan masyarakat yang kurang berperan aktif dalam kegiatan spiritual.

4.3.3 Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh LPM Kelurahan Jatihandap

Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang menyebutkan bahwa tugas LPM adalah sebagai berikut : .Pasal 3 (1) LPM mempunyai tugas : a. menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan Pemerintah; b. menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; c. memantau pelaksanaan pembangunan; d. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPM mempunyai fungsi: a. sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan; b. sebagai media komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat. Sehingga peneliti melakukan penelitian tentang perencanaan program pemberdayaan masyarakat miskin.

Menurut Sudjana (2010:56) perencanaan mempunyai ciri-ciri :

- a. perencanaan merupakan model pengambilan keputusan secara rasional dalam memilih dan menetapkan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan
- b. perencanaan berorientasi pada perubahan dari keadaan masa sekarang kepada suatu keadaan yang diinginkan pada masa datang sebagaimana dirumuskan dalam tujuan yang akan dicapai.
- c. Perencanaan melibatkan orang-orang ke dalam suatu proses untuk menentukan dan menemukan masa depan yang diinginkan.

- d. perencanaan memberi arah mengenai bagaimana dan kapan tindakan akan diambil serta siapa pihak yang terlibat dalam tindakan atau kegiatan itu.
- e. Perencanaan melibatkan perkiraan tentang semua kegiatan yang akan dilalui atau dilaksanakan.
- f. perencanaan berhubungan dengan penentuan prioritas dan urutan tindakan yang dilakukan.
- g. perencanaan sebagai titik awal untuk dan arahan terhadap kegiatan pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian dan pengembangan.

Hal diatas sesuai dengan perencanaan program pemberdayaan masyarakat miskin di kelurahan Jatihandap.

Sebelumnya peneliti telah menemukan kondisi kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan kota di RW 06 Kleurahan Jatihandap. Maka kriteria utama menurut LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) untuk perencanaan program pemberdayaan masyarakat miskin kota di RW 06 Kelurahan Jatihandap adalah aspek Ekonomi dengan bobot 0.489. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermanfaat. Oleh karena itu aspek ekonomi merupakan aspek penting untuk memberdayakan masyarakat miskin.

Dengan tingginya bobot aspek Ekonomi dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat miskin kota maka prioritas utama dari sub kriteria ekonomi adalah UMKM. Dengan diadakannya UMKM maka hal ini diharapkan mampu meberdayakan masyarakat miskin perkotaan. Hal ini sesuai dengan model perencanaan sosial menurut (*social planning mode*) Rothman dalam Hikmat (2010:55) yang menyatakan bahwa model pemberdayaan sosial memiliki sasaran atau tujuan utama yaitu menciptakan, menyusun dan memberikan bantuan-bantuan, baik bersifat materi maupun pelayanan-pelayanan yang berbentuk jasa kepada orang-orang yang membutuhkannya. Karena itu kemampuan dan kecakapan masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahannya harus dikembangkan secara terencana, terarah dan terkendali.

Sub kriteria yang dianggap prioritas kedua adalah penguatan koperasi dengan bobot 0.256. Dalam kaitannya terhadap

aspek ekonomi LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) menjadikan koperasi merupakan kriteria penting juga untuk memberdayakan masyarakat. Melalui kegiatan koperasi diharapkan masyarakat miskin di kelurahan Jatihandap mampu berdaya. Selanjutnya hal yang dianggap penting dalam aspek ekonomi lainnya adalah budaya menabung dengan bobot 0.210. Dimana menabung merupakan bukan suatu kewajiban namun menabung merupakan hal yang baik jika dilakukan. Menurut LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) menganggap menabung adalah hal yang penting bagi masyarakat miskin kota. Namun menerapkan budaya menabung bukan prioritas utama pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi ini.

Dalam perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin kota LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) juga mengemukakan bahwa aspek Sosial Budaya dan Agama merupakan hal yang dianggap penting. Hal ini terbukti bahwa program perencanaan dalam aspek sosial budaya dan agama menjadi prioritas kedua yang berbobot 0.287. Dimana sub kriteria tertinggi dari aspek sosial budaya dan ekonomi ini adalah bantuan untuk lansia yang berbobot sebesar 0.549. Hal ini sesuai dengan pendapat Himat (2008:52) yang menyatakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial dengan intinya kepada pelayanan sosial personal (personal social services) dengan sasaran mencakup (1) kelompok-kelompok khusus yang membutuhkan pelayanan sosial, seperti usia lanjut, anak terlantar, korban ketergantungan obat dll (2) kelompok-kelompok marginal dalam konteks ekonomi atau dalam masalah pembangunan (3) kelompok minoritas seperti komunitas adat terpencil dan (4) kelompok yang mengalami kecacatan. Hal ini menyatakan bahwa LPM (Lembaga pemberdayaan Masyarakat) menjadikan bantuan untuk lansia prioritas utama dalam aspek sosial budaya dan agama karena dengan dasar masyarakat miskin di kelurahan Jatihandap lebih dari setengahnya berusia lanjut.

Sub kriteria yang merupakan dianggap penting selanjutnya adalah kesehatan yang berbobot 0.254. Seperti yang kita ketahui bahwa kurang dari setengahnya masyarakat miskin di Rw 06 Kelurahan Jatihandap adalah masyarakat lansia sehingga sangat diperlukan program-program yang dapat menunjang kesehatan masyarakat tersebut. Hal ini sesuai dengan Hikmat (2004:81) yang mengatakan bahwa masyarakat yang sehat merupakan produk masyarakat yang aktif sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat

aktif adalah masyarakat yang berdaya. Selanjutnya kegiatan keagamaan menjadi prioritas ketiga dalam aspek sosial budaya dan agama yang memiliki bobot 0.118. kegiatan keagamaan merupakan kegiatan yang penting mengingat masyarakat miskin di Rw 06 juga banyak yang lansia sehingga sangat diperlukan kegiatan seperti majlis taklim. Selanjutnya prioritas terakhir adalah pembangunan rutilahu yang berbobot sebesar 0.080. rutilahu atau rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan masyarakat miskin sehingga program ini termasuk kedalam program pemberdayaan masyarakat miskin.

Prioritas ketiga dalam aspek perencanaan program pemberdayaan masyarakat miskin kota adalah kemasyarakatan dimana dalam aspek ini memiliki bobot 0.150. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) menganggap hal ini penting karena menjadi kriteria dalam perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin kota. Beberapa upaya harus dilakukan oleh LPM (Lembaga pemberdayaan Masyarakat) untuk memberdayakan masyarakat. Penyuluhan menjadi prioritas utama dalam aspek kemasyarakatan dengan bobot 0.472 dimana penyuluhan itu sendiri beragam bentuknya. Hal ini sejalan dengan pendapat Rothman dalam Hikmat (2010:53) yang mengatakan bahwa perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan dengan optimal bila melibatkan partisipasi aktif yang luas di semua spectrum masyarakat tingkat lokal hal ini disebut model pengembangan lokal (Locallity Development Model). Pembangunan masyarakat adalah proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi sosio-ekonomi yang lebih maju dan sehat bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi aktif mereka sendiri. Ini berarti dengan mengadaannya penyuluhan berarti dapat meningkatkan partisipasi masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat menjadi terberdayakan.

Selanjutnya prioritas kedua pada aspek kemasyarakatan ada Penguatan Siskamling yang memiliki bobot 0.309. Hikmat (2010:64) mengatakan bahwa pengintegrasian masyarakat hendaknya dipandang sebagai proses sosial yang memperlancar (1) pertumbuhan kesadaran dan kesetiaan (loyalitas) kepada masyarakat, termasuk perorangan yang menjadi salah satu bagiannya, (2) peningkatan perasaan tanggung jawab (sense of responsibility) terhadap kondisi dan kedudukan masyarakat, (3) pemunculan sikap-sikap yang memungkinkan adanya kerjasama yang baik dengan orang yang mempunyai perbedaan dalam berbagai

segi, dan (4) pertumbuhan nilai-nilai yang sama di dalam masyarakat secara keseluruhan. Sehingga dapat dikatakan bahwa penguatan siskamling mampu menjadikan masyarakat yang memiliki rasa tanggung jawab dan loyalitas tinggi kepada lingkungannya. Siskamling sendiri biasa dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Adapun prioritas yang ketiga dari aspek Kemasyarakatan adalah pelatihan yang memiliki bobot 0.219. Hal ini merupakan salah satu pendukung terciptanya masyarakat yang berdaya dimana jika ada pelatihan otomatis masyarakat miskin dapat menambah ilmu pengetahuannya. Selain menambah ilmu pengetahuan pelatihan juga dapat menjadikan seseorang mempunyai skill atau keterampilan lain. Hal ini dapat membedakan masyarakat miskin dengan masyarakat lainnya yaitu mempunyai keterampilan sehingga jika terus menerus diasah hal ini dapat merubah msyarakat miskin menjadi masyarakat yang berdaya.

Priority ke empat dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat miskin kota ini adalah aspek lingkungan dengan bobot 0.074. Lingkungan menjadi aspek penting dalam mewujudkan masyarakat yang berdaya. Karena di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri hidup. Lingkungan berarti memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan kita. Sehingga baik buruknya seseorang terlihat dari lingkungannya. Yang menjadi prioritas utama dalam aspek lingkungan adalah pemeliharaan lingkungan yang berbobot 0.540. untuk menciptakan masyarakat yang berdaya diperlukan lingkungan yang baik dan untuk menciptakan lingkungan yang baik maka diperlukan adanya pemeliharaan lingkungan. Dapmpak dari pemeliharaan lingkungan akan sangat besar. Sebagai contoh jika lingkungan bersih sebagai masyarakat yang tinggal di dalamnya kita akan menjadi sehat dan masyarakat sehat adalah masyarakat yang berdaya karena dengan sehat masyarakat menjadi mandiri.

Prioritas kedua dalam aspek lingkungan adalah bersih-bersih kali. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pemeliharaan lingkungan. Namun jika bersih-bersih kali otomatis masyarakat mengadakan secara gotong royong sehingga kekeluargaan dalam masyarakat itu lebih terasa. Prioritas terakhir adalah pemanfaatan lahan tandur dengan bobot 0.180.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa prioritas utama dalam perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin kota adalah aspek ekonomi dengan kriteria UMKM. Harapan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dengan diadakannya

UMKM bagi masyarakat miskin di Kelurahan Jatihandap adalah terciptanya masyarakat yang memiliki penghasilan sampingan karena yang kita ketahui bahwa faktor utama kemiskinan di Kelurahan Jatihandap adalah tidak adanya pekerjaan lain yang dapat membantu perekonomian keluarga. Oleh karena itu perencanaan program masyarakat miskin kota adalah diadakannya UMKM bagi masyarakat miskin.